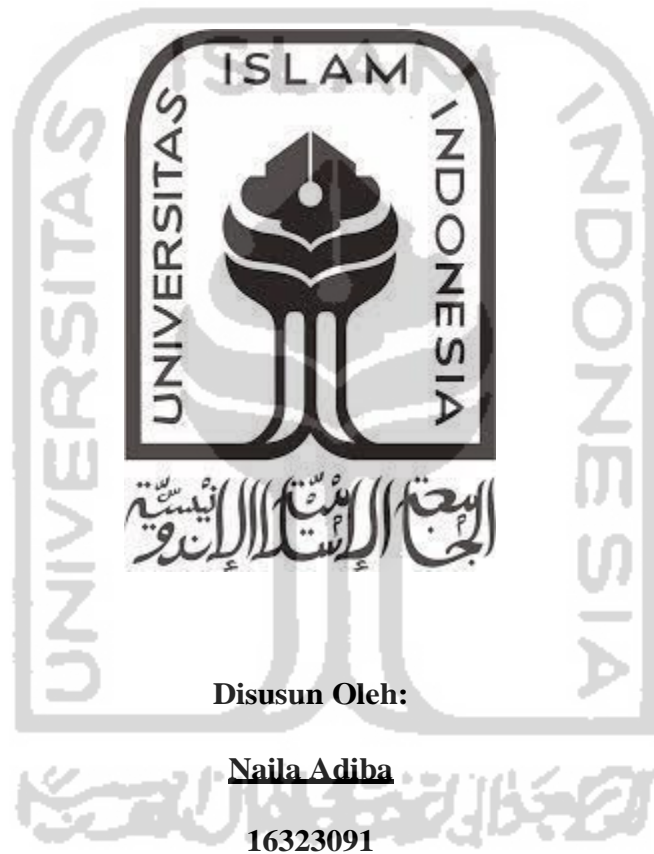


**ANALISIS PENGARUH IDENTITAS TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI
ISRAEL DALAM MERESPON KEBIJAKAN MUHAMMAD MURSI DI MESIR**

TAHUN 2013

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Naila Adiba

16323091

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**ANALISIS PENGARUH IDENTITAS TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI
ISRAEL DALAM MERESPON KEBIJAKAN MUHAMMAD MURSI DI MESIR**

TAHUN 2013

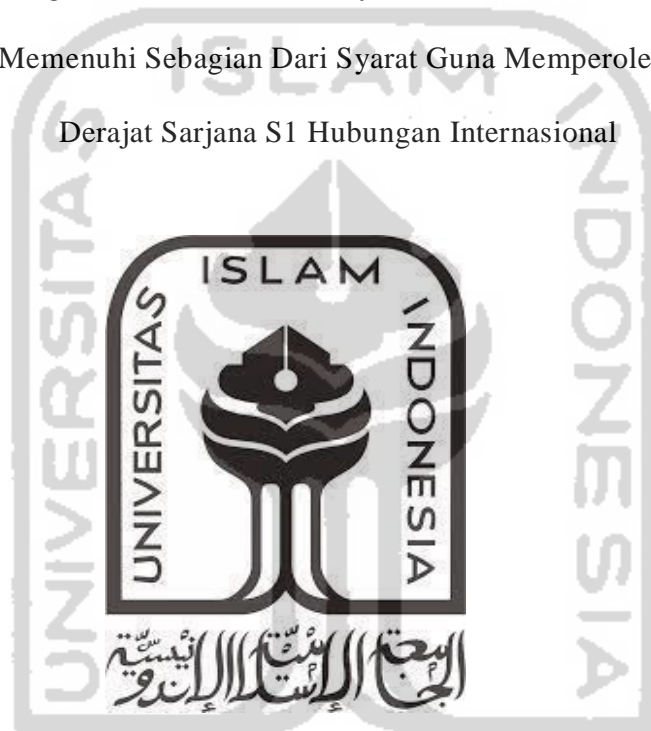
SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NAILA ADIBA

NIM: 16323026

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH IDENTITAS TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI
ISRAEL DALAM MERESPON KEBIJAKAN MUHAMMAD MURSI DI MESIR
TAHUN 2013**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

25 Agustus 2020

Mengesahkan,
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi


(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

NIK. 123230101

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

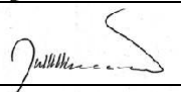
1. Hasbi Aswar S.IP., M.A.

2. Gustrieni Putri S.IP., M.A.

3. Willi Ashadi S.H.I., M.A.







HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naila Adiba
No. Mahasiswa : 16323091
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Identitas Terhadap Kebijakan Luar Negeri Israel Dalam Merespon Kebijakan Muhammad Mursi di Mesir Tahun 2013

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Yang menyatakan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ini penulis persembahkan untuk;

Ibu dan Bapak

Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis, dikala penulis membutuhkan bantuan baik itu dukungan semangat, doa, ataupun materil. Kasih sayang dan dukungan yang diberikan oleh kedua orang tua penulis adalah yang mengantarkan penulis hingga sampai titik ini. Terimakasih atas kerja keras, kasih sayang, dan kepeduliannya

Keluarga Besar Bani Zahro dan Bani Maskun

Terimakasih untuk keluarga besar Bani Zahro dan Bani Maskun yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penelitian ini. Terutama kepada mas ghoni yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraa Kaatuh

Segala puja dan puji syukur tercurahkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan karunia dan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa, sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan saat ini.

Rasa syukur juga diberikan atas banyaknya dukungan dan doa dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis sadar bahwa penelitian jauh dari kata sempurna, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Atas selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada:

1. Bapak (Luthfi Hakim) dan Ibu (Rasmijah), atas dukungan baik itu moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
2. Keluarga besar Bani Zahro maupun Bani maskun atas doa dan dukungannya. Terutama kepada mas Ghoni yang telah memberikan saran yang bermanfaat dalam penelitian ini.
3. Bapak Willi Ashadi S.H.I., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, saran dan solusi. Tanpa beliau penulis tidak dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.

4. Teman-teman seperjuangan Tika, Sofa, Nailis, Tara dan Aida yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini. terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik ketika penulis mengalami kendala dalam penyelesaian penelitian.
5. Teman-teman alumni Gontor 2015, Prestigious UII. Syifa, Nanda, Mella, Sofa, Tika dsb. Yang telah menemani dan memberikan warna selama hidup bersama di jogja. Terimakasih atas doa, dukungan serta canda tawa yang sudah kita bagi bersama.



HALAMAN MOTTO

“Wherever life takes you, whenever your problem gets hard, always remember to put your head on the floor and beg to your Lord, because there is no one in this world who will carry the universe for you”

***Naila Adiba**



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
HALAMAN MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Signifikansi Penelitian	3
1.5 Cakupan Penelitian.....	4
1.6 Tinjauan Pustaka.....	4
1.7 Landasan Teori/ Konsep	7
1.8 Metode Penelitian	9
1.9 Subjek dan Objek Penelitian.....	10
a. Subjek Penelitian	10
b. Objek Penelitian	10
1.10 Metode Pengumpulan Data	10
1.11 Proses Pengumpulan Data	11
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN ISRAEL DENGAN MESIR DAN POLITIK MUHAMMAD MURSI	12
2.1 Dinamika Hubungan Israel dengan Mesir	12

a. Perang Enam Hari	13
b. Perang Yom Kippur.	14
c. Perjanjian Camp David	15
d. Kestabilan Hubungan Setelah Camp David.....	15
e. Kemunduran Hubungan Israel dengan Mesir.	17
f. Hubungan Kedua Negara setelah Kudeta	18
2.2 Biografi Muhammad Mursi	19
2.3 Kebijakan Presiden Muhammad Mursi terhadap Israel.....	20
1. Menambahkan jumlah pasukan yang berjaga di Semenanjung Sinai.....	22
2. Membuka Terowongan Rafah untuk membantu blokade Gaza	23
3. Penarikan Duta Besar Mesir Untuk Israel	24
4. Mesir Menjadi Mediator dalam Gencatan Senjata Israel dan Hamas....	25
BAB III ANALISIS IDENTITAS ISRAEL DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERINYA TERHADAP KEBIJAKAN MUHAMMAD MURSI	27
3.1 Identitas dalam Teori Konstruktivisme.....	27
3.2 Identitas Negara Israel	28
3.3 Analisis Pengaruh Identitas Terhadap Kebijakan Luar Negeri Israel	30
1. Respon Israel terhadap penambahan jumlah pasukan Mesir di Sinai.....	33
2. Respon Israel terkait pembukaan terowongan Rafah oleh Mesir	34
3. Respon Israel mengenai bantuan Mesir kepada Palestina setelah operasi pilar pertahanan.....	35
BAB IV KESIMPULANDAN SARAN.....	37
4.1. KESIMPULAN	37
4.2. SARAN	38
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik I: Pasang Surut Hubungan Israel dengan Mesir..... 11



DAFTAR SINGKATAN

- FJP : *Freedom and Justice Party*
- HAMAS : *Harakat al- Muqawwamatul Islamiyyah*
- MEMRI : *Middle East Media Research Institute*
- PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa
- PLO : *Palestine Liberation Organization*



Abstrak

Bangsa Yahudi yang pada awalnya merupakan bangsa yang berdiaspora di seluruh dunia pada akhirnya dapat bersatu ketika negara Israel merdeka pada tahun 1948. Gerakan zionisme yang awalnya muncul akibat dari rasa nasionalisme yang tumbuh ketika bangsa Yahudi mendapatkan diskriminasi dari berbagai bangsa di dunia menjadi identitas bagi negara Israel. Ide pokok zionisme adalah gabungan dari nasionalis dan agama. Upaya Israel untuk bertahan di Palestina mendapatkan hambatan ketika Mesir dikuasai oleh presiden dengan latar belakang Ikhwanul Muslimin. Mursi membuat kebijakan yang berpihak kepada Palestina. Kebijakan-kebijakan tersebut apabila dibiarkan akan membawa pengaruh buruk bagi negara Israel. Untuk itu dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bagaimana identitas Israel mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dibuat oleh Israel dalam menanggapi kebijakan luar negeri Mursi. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme yang mana menganggap bahwa identitas negara merupakan komponen penting dalam pembuatan kebijakan negara di dunia internasional. Ajaran nasionalisme yang ada dalam zionisme dan kepentingan untuk mempertahankan wilayahnya adalah latar belakang dari setiap kebijakan yang diambil oleh Israel dalam menanggapi kebijakan Muhammad Mursi.

Kata Kunci: Zionisme, Israel dan Mesir

Abstract

The Jewish nation, which was originally a diasporic nation around the world, was finally able to unite when the state of Israel became independent in 1948. The Zionism movement which initially emerged as a result of a sense of nationalism that grew when the Jewish people received discrimination from various nations in the world became an identity for the state of Israel. . The main idea of Zionism is a modern and secular nationalist. Israel's efforts to survive in Palestine encountered obstacles when Egypt was controlled by a president with a Muslim Brotherhood background. Mursi made a policy that sided with Palestine. If these policies are allowed to have a negative impact on the state of Israel. For this reason, this research will examine how Israel's identity affects the policy making made by Israel in response to Morsi's foreign policy. This study uses constructivism theory which considers that state identity is an important component in state policy-making in the international world. The teachings of nationalism in Zionism and the importance of defending its territory are the background of every policy taken by Israel in response to Muhammad Mursi's every policy.

Keywords: Zionism, Israel and Egypt

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Yahudi merupakan bangsa yang berdiaspora di seluruh penjuru dunia pada akhirnya bersatu ketika negara Israel merdeka pada tahun 1948. Setelah merdeka, Israel menggunakan ideologi zionisme sebagai dasar dan identitas negaranya. Semangat nasionalisme yang ada dalam zionisme membuat Israel berupaya untuk mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatan wilayahnya. Semenjak kemerdekannya, Israel mendapatkan banyak pertentangan dari negara-negara Arab salah satunya adalah Mesir. Ketidakstabilan hubungan kedua negara disebabkan oleh perbedaan kepentingan kedua negara mengenai konflik Palestina. Israel berupaya untuk tetap ingin mempertahankan kekuasaannya di wilayah tersebut, sedangkan Mesir merupakan salah satu negara yang menentang berdirinya negara Israel di wilayah tersebut.

Kestabilan hubungan antara Israel dan Mesir dimulai ketika kedua negara sepakat untuk menandatangani perjanjian Camp David pada tahun 1979. Dengan adanya perjanjian tersebut, secara resmi Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Israel di wilayah Palestina (Salameh, 2012). Akibat dari perjanjian damai Camp David, Mesir tidak dapat membantu maupun membela kemerdekaan Palestina seperti sedia kala.

Akan tetapi kestabilan tersebut tidak bertahan lama karena setelah gelombang Arab Spring mulai memasuki pemerintahan Mesir, aksi tersebut juga mempengaruhi pemerintahan Presiden Hosni Mubarak. Hosni Mubarak merupakan presiden terakhir yang menjaga kestabilan hubungan antara Mesir dan

Israel. Setelah Arab Spring berakhir dan berhasil menumbangkan rezim Hosni Mubarak, Mesir untuk pertama kalinya melakukan pemilu presiden. Dalam pemilu tersebut kelompok Ikhwanul Muslimin menang dan menjadikan utusannya dari partai FJP yaitu Muhammad Mursi resmi menjabat menjadi presiden Mesir pada tahun 2015.

Mesir yang memiliki latar belakang Ikhwanul Muslimin memiliki pandangan yang berbeda mengenai konflik Palestina-Israel. Mursi kembali bertekad untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan semakin memberikan jarak terhadap hubungan negaranya dengan Israel. Mursi juga menjadikan isu Palestina sebagai isu utama dalam kebijakan luar negerinya. Mursi secara rutin memberikan bantuan terhadap Palestina melalui Hamas. Bantuan-bantuan tersebut diantaranya adalah membuka terowongan Rafah untuk membebaskan masyarakat Gaza terhadap blokade yang diberlakukan oleh Israel dan menjadi mediator atau penengah dalam konflik tersebut dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana identitas nasional Israel mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel dalam merespon kebijakan luar negeri Muhammad Mursi. Hal ini dikarenakan kebijakan dan bantuan Mursi kepada Palestina dalam jangka waktu yang panjang dapat mengganggu kedaulatan Israel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan mengkaji mengenai analisis kebijakan luar negeri Israel terhadap pemerintahan Muhammad Mursi . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana identitas Israel dalam mempengaruhi kebijakan luar negerinya untuk merespon kebijakan Muhammad Mursi?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk menganalisis bagaimana identitas negara Israel mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat untuk merespon kebijakan luar negeri Muhammad Mursi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting karena perbedaan kepentingan Israel dan juga Mesir ketika dibawah pemerintahan Mursi mengenai Palestina akan memberikan dampak buruk terhadap eksistensi Israel apabila hal tersebut terjadi dalam jangka panjang. Melalui kebijakan-kebijakannya Mursi memberikan bantuannya terhadap pemerintahan Palestina membuat otoritas Palestina semakin berani untuk menentang Israel dan meningkatkan intensitas serangan mereka terhadap pemerintahan Israel. Untuk itu perlu dikaji kebijakan luar negeri apa saja yang diberikan oleh Israel untuk merespon bantuan yang diberikan oleh Mursi dan bagaimana identitas negara Israel mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian yang digunakan penulis terkait dengan topik diatas adalah mengenai kebijakan luar negeri Israel dalam merespon kebijakan Mursi pada tahun 2012 hingga 2013. Penulis akan menggunakan hasil analisis dari cakupan tersebut untuk menganalisis bagaimana identitas Israel mempengaruhi kebijakan luar negerinya dalam merespon kebijakan luar negeri Muhammad Mursi.

1.6 Tinjauan Pustaka

Guna mendapatkan landasan ilmiah mengenai penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa sumber literatur yang sejenis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Yang pertama adalah jurnal yang membahas mengenai dinamika naik turunnya agresifitas kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa segala kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina bertujuan untuk menganeksasi wilayah Palestina dan menguasai keseluruhan wilayah negara tersebut. Naik turunnya agresifitas kebijakan luar negeri Israel terhadap Palestina tergantung pada rezim yang sedang berkuasa di negara tersebut. Ketika agresifitas Israel terhadap Palestina naik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Israel adalah dengan memberikan serangan kepada Hamas, meningkatkan pembangunan pemukiman Yahudi di Jerusalem Timur dan pengetatan terhadap blokade Gaza (Pradana, 2012).

Pada masa pemerintahan Yitzhak Samir terjadi perjanjian Oslo yang menandai pelunakan agresifitas kebijakan luar negeri Israel. Ketika Israel dikuasai oleh Benyamin Netenyahu, agresifitas meningkat dengan diberlakukannya kebijakan

aneksasi. Netanyahu memberikan izin kepada warganya untuk hidup ditengah wilayah penduduk Palestina. Agresifitas kembali menurun ketika Israel dipimpin oleh perdana menteri Ehud Barak. Pada masa pemerintahannya, Ehud Barak berupaya untuk membuat perjanjian Camp David II dengan pimpinan otoritas Palestina yaitu Yasser Arafat. Akan tetapi agresifitas kembali naik setelah Israel dipimpin oleh perdana menteri Ariel Sharon dan Benjamin Netanyahu. Kedua perdana menteri kembali melakukan upaya aneksasi terhadap wilayah Palestina untuk menguasai keseluruhan wilayah tersebut (Pradana, 2012).

Jurnal yang kedua membahas mengenai lobi yang dilakukan Israel kepada pemerintahan Amerika Serikat sehingga negara tersebut dapat melindungi Israel di Timur Tengah. Israel tidak akan mampu bertahan di Timur Tengah tanpa bantuan Amerika. Beberapa kebijakan yang diberlakukan Amerika mengenai Israel sering kali merupakan hasil dari Israel itu sendiri. Israel sering memanfaatkan posisi Amerika untuk kepentingan negaranya. Salah satu contohnya adalah Amerika merupakan anggota keamanan PBB sehingga ia memiliki hak untuk melakukan veto terhadap resolusi PBB. Israel melakukan lobi kepada Amerika untuk memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mewajibkan Israel untuk melakukan gencatan senjata dan menarik pasukannya dari Lebanon (Ramadhan, 2017)

Jurnal yang ketiga adalah jurnal yang membahas mengenai kebijakan luar negeri Israel dibawah pemerintahan perdana menteri Benjamin Netanyahu. Perdana menteri Benjamin Netanyahu merupakan representasi dari partai sayap kanan Israel yaitu partai Likud. Partai Likud merupakan partai nasionalis garis keras yang memiliki tujuan utama untuk melakukan aneksasi wilayah Palestina. partai Likud tidak menghendaki adanya kompromi dengan Palestina dan menolak

berdirinya negara Palestina. Selama menjabat menjadi perdana menteri, Netanyahu melakukan penyerangan terhadap Palestina dari mulai tahun 2010. Selain itu pemerintahan Netanyahu juga memperketat blokade di wilayah Gaza yang mulai diberlakukan pada tahun 2007 (Hoffman, 2017).

Jurnal yang keempat membahas mengenai lobi yang dilakukan oleh Israel kepada Amerika Serikat untuk menggagalkan rencana Palestina dalam bergabung dengan organisasi PBB. Meskipun wilayah Palestina dinilai sebagai wilayah sengketa, hal tersebut tidak menyurutkan semangat negara tersebut untuk merdeka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Palestina dalam mendapatkan pengakuan bagi dunia internasional adalah dengan bergabung dalam PBB. Akan tetapi keinginan Palestina untuk bergabung dengan PBB ditentang oleh Amerika. Amerika beralasan dengan bergabungnya Palestina dalam organisasi PBB akan membawa ketidak stabilan dalam organisasi tersebut (Chandra, 2018). Penolakan Amerika terhadap bergabungnya Palestina dengan organisasi PBB adalah hasil dari lobi dan kedekatan antara Israel dengan Amerika. Kedekatan kedua negara membuat Amerika mau untuk membantu Israel dalam mempertahankan kekuasaannya di Palestina. Sedangkan Israel menjadi perpanjangan tangan Amerika di Timur Tengah.

Jurnal kelima membahas mengenai lobi Israel kepada Amerika terkait aneksasi yang dilakukan oleh Israel pada wilayah Palestina. Pada tanggal 6 Desember 2017, dunia internasional dikejutkan dengan pengumuman yang dibuat oleh Donald Trump dimana ia menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibukota Israel dan pusat pemerintahan Israel. Terdapat berbagai reaksi dari dunia internasional mengenai pengumuman yang diberikan oleh Trump. Dengan adanya pengakuan

terhadap Yerusalem sebagai ibukota dari Israel menandakan semakin luasnya aneksasi yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina. Dukungan yang diberikan oleh Donald Trump terhadap kepindahan ibukota Israel menunjukkan keberhasilan lobi Yahudi di Amerika. Bahkan Donald Trump telah mengakui dan akan menjamin bahwa Amerika adalah teman dan pendukung sejati Israel (Eka Risya Fitri, 2019).

1.7 Landasan Teori/ Konsep

Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme memiliki pandangan berbeda mengenai konsep materialis dalam hubungan internasional yang dikemukakan oleh kaum liberalis. Konstruktivisme berpendapat bahwa struktur pergaulan manusia adalah sebuah fenomena budaya bukan material. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang mengklaim bahwa semua negara di dunia bertindak sesuai dengan bagaimana mereka melihat dunia itu sendiri. Persepsi ini muncul dari identitas yang menurut kaum konstruktivis dibentuk dari pengalaman dan norma-norma sosial yang dianut oleh negara tersebut.

Bagi konstruktivis, konsep identitas sangat penting karena memiliki peran dalam interaksi antar personal maupun interaksi internasional (Behvaresh 2011). Identitas akan menunjukkan kepentingan aktor dan motivasi dari perilaku aktor. Karena seseorang tidak akan tahu apa yang akan mereka lakukan sebelum orang itu mengetahui identitas mereka dan posisi mereka (Wendt 1999). Dengan mengetahui identitas atau posisi negara, setiap negara akan dapat mengidentifikasi kepentingan mereka dalam dunia global dan dapat membuat kebijakan yang dapat melayani

kepentingan mereka (Richard W. Mansbach 2008). Identitas tersebut akan tercermin dalam pembuatan kebijakan yang menentukan cara sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam dunia internasional. Atau dapat dikatakan bahwa faktor domestik berperan dalam menentukan bagaimana negara bertindak dalam politik internasional (Rosyidin 2012)

Menurut konstruktivis yang dapat menentukan identitas negara adalah aturan, bahasa, budaya, ideologi dan norma yang dianut oleh negara. Konstruktivis beranggapan bahwa negara memiliki sifat sosial sehingga ide-ide, norma yang dianut oleh negara dapat berkembang selama negara tersebut bersosialisasi. Sehingga, identitas dan kepentingan negara dapat berubah mengikuti berkembangnya keyakinan dan norma.

Penulis beranggapan bahwa teori konstruktivisme merupakan teori yang paling sesuai digunakan untuk menganalisis mengenai kebijakan luar negeri yang diberikan Israel untuk merespon kebijakan luar negeri Muhammad Mursi. Sejak berdirinya Israel diwilayah Palestina, Israel menggunakan zionisme sebagai ideologi negaranya. Ideologi zionisme yang dianut oleh Israel merupakan perpaduan antara nasionalis dan agama (Waisberg 2008). Israel merupakan negara atau rumah bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia. Ketakutan terhadap tragedi Holocaust dan gerakan anti semit yang melatarbelakangi berdirinya negara Israel. Cita-cita Theodore Hertzl untuk mendirikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi tercapai pada tahun 1948.

Ideologi Zionisme yang merupakan gabungan dari nasionalis dan agamis ini digunakan untuk menjaga nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Yahudi. Nilai-nilai tersebut adalah universalisme, individualisme, kebebasan hati nurani dan juga

untuk menjaga negara Israel sebagai negara Yahudi (Waisberg 2008). Ideologi Zionis semakin ditekankan di negara Israel setelah melihat banyaknya upaya yang dilakukan oleh negara-negara Arab untuk merebut kembali wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah perang yang dilakukan oleh negara-negara Arab untuk membela Palestina dan juga gerakan Intifada yang dilakukan oleh masyarakat Palestina terhadap Israel.

Teori konstruktivisme berargumen bahwa identitas negara memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh negara. Untuk itu dalam penelitian ini akan dijabarkan bagaimana ideologi Zionisme sebagai identitas negara Israel akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diberlakukan oleh Israel untuk merespon terhadap kebijakan luar negeri Muhammad Mursi.

1.8 Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu peneliti menghasilkan penemuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, serta proses-proses sosial. Penelitian dengan metode kualitatif lebih berfokus pada makna dan pemahaman dan tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Penelitian kualitatif sering dipakai untuk menganalisa dalam bidang lintas disiplin ilmu sosial. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada paradigma penafsiran serta hubungan antara teori dengan penelitian (Corbetta, 2003).

1.9 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian disini adalah orang, tempat ataupun benda yang diamati dalam penelitian. Subjek yang diamati dalam penelitian ini adalah negara Israel.

b. Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian disini adalah yang menjadi sasaran dalam penelitian. Sasaran penelitian ini dapat berupa benda atau pokok persoalan yang hendak diteliti. Objek yang hendak diamati dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Israel untuk merespon kebijakan luar negeri Muhammad Mursi.

1.10 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan terjun ke lapangan. Melainkan dengan menggunakan data yang telah tersedia sebelumnya. Yang kemudian data ini akan diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder yang diambil dari berbagai buku, dokumen dan tulisan lain yang relevan sehingga dapat digunakan untuk mengungkap objek penelitian.

1.11 Proses Pengumpulan Data

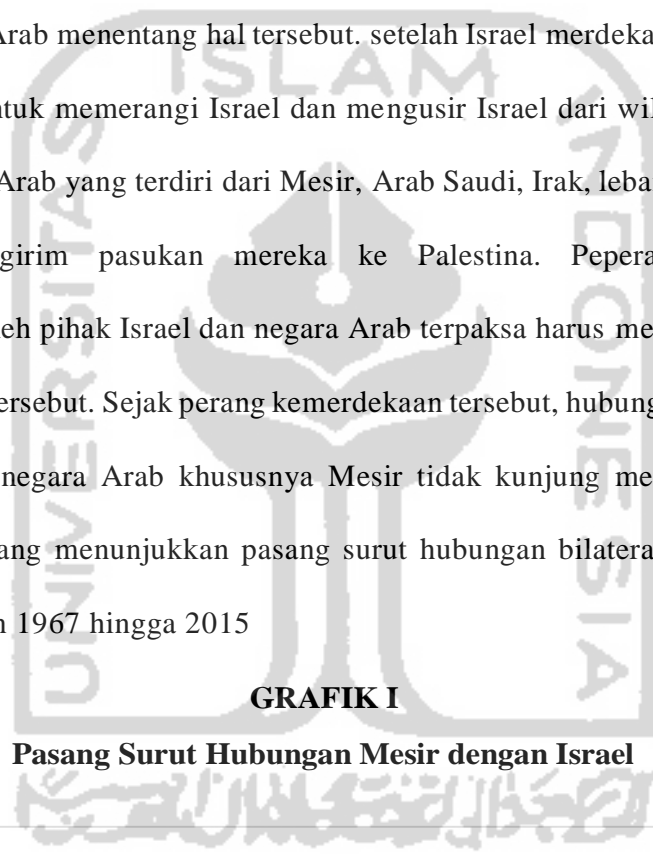
Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti oleh penulis. Data data yang akan ditemukan ini nantinya akan diolah sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.



BAB II
DINAMIKA HUBUNGAN ISRAEL DENGAN MESIR DAN POLITIK
MUHAMMAD MURSI

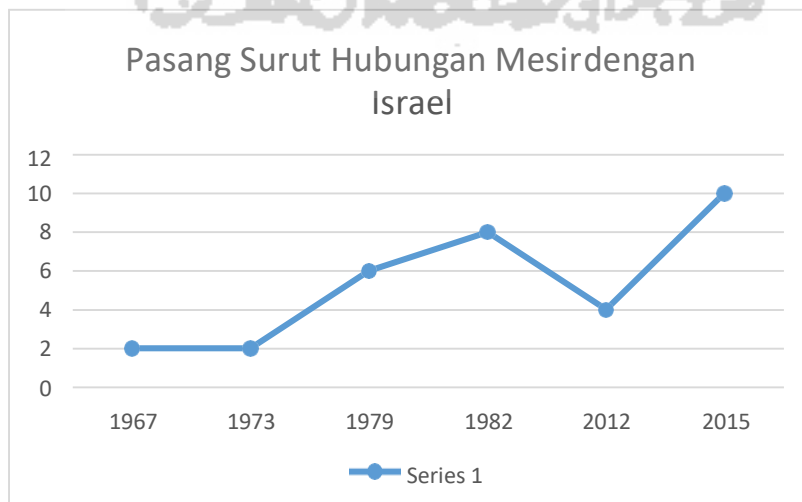
2.1. Dinamika Hubungan Israel dengan Mesir

Hubungan bilateral antara Israel dengan Mesir dimulai saat negara Israel merdeka tahun 1948. Setelah Israel secara resmi berdiri di wilayah Palestina, negara-negara Arab menentang hal tersebut. Setelah Israel merdeka, negara-negara Arab bersatu untuk memerangi Israel dan mengusir Israel dari wilayah Palestina. Negara-negara Arab yang terdiri dari Mesir, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Suriah dan Yordania mengirim pasukan mereka ke Palestina. Peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Israel dan negara Arab terpaksa harus menanggung malu dari kekalahan tersebut. Sejak perang kemerdekaan tersebut, hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab khususnya Mesir tidak kunjung membaik. Berikut adalah grafik yang menunjukkan pasang surut hubungan bilateral Israel dengan Mesir dari tahun 1967 hingga 2015



GRAFIK I

Pasang Surut Hubungan Mesir dengan Israel



Keterangan:
(2.) Perang
(4.) Pemutusan Hubungan Diplomatik
(6.) Perjanjian Damai
(8.) Kestabilan Politik
(10.) Kerjasama

a. Perang Enam Hari

Pada bulan Mei tahun 1967, Selat Tiran yang merupakan kawasan yang digunakan oleh Israel untuk berdagang dan beraktifitas ditutup oleh Mesir (Karsh, 2017). Mesir melarang segala jenis aktifitas yang dilakukan oleh Israel di wilayah tersebut. Mesir melakukan hal tersebut untuk mempersulit pergerakan Israel di Timur Tengah. Mesir bersama negara Yordania, Irak dan Suriah bergabung untuk menandatangani pakta kerjasama militer. Dengan adanya perjanjian tersebut menunjukkan momentum bersatunya negara Arab untuk kembali menyerang Israel. Penyerangan terhadap Israel dilakukan oleh negara-negara Arab karena mereka ingin untuk membalas kekalahan yang dialami negara-negara Arab selama perang kemerdekaan.

Pada tanggal 30 Mei 1967, telah mengepung Israel. Menurut Abba Eban, hal ini membuat bangsa Yahudi kembali mengingat peristiwa Holocaust dan permusuhan bangsa Eropa. Amerika ingin membantu Israel melawan blokade yang dilakukan oleh bangsa Arab kepadanya dengan mengawal kapal-kapal Israel ketika melewati Selat Tiran (BICOM Briefing, 2017). Bantuan Amerika terhadap Israel membuat negara-negara Arab mulai melakukan serangan terhadap Israel. Pada awalnya Israel ingin merespon pengepungan yang dilakukan oleh negara Arab dengan perundingan. Akan tetapi setelah serangan telah dilakukan Israel tidak memiliki pilihan lain selain dengan melawan. Peralwanaan Israel membuahkan hasil dengan berhasil mengalahkan serangan udara negara Arab hanya dalam kurun waktu tiga jam. Persatuan militer negara Arab yang berada di gunung Sinai juga

berhasil diusir oleh Israel. Israel berhasil memenangkan perang dan menguasai beberapa wilayah Arab seperti Semenanjung Sinai, Sungai Jordan dan Dataran Tinggi Golan (Karsh, 2017).

b. Perang Yom Kippur

Perang antara Israel dan Mesir kembali terjadi pada tahun 1973. Perang tersebut dinamakan perang Yom Kippur karena terjadi pada saat hari raya bangsa Yahudi yaitu hari raya Yom Kippur. Peperangan tersebut terjadi Karena Mesir dan negara Arab lainnya ingin merebut kembali wilayah negaranya yang telah dikuasai Israel akibat dari Perang Enam Hari pada tahun 1967 (Marsot, A History Of Egypt From the Arab Conquest to the Present, 2007). Sebelum peperangan terjadi, Israel mendengar kabar bahwa Mesir dan negara lainnya telah bersatu untuk mempersiapkan peperangan dengan Israel. Akan tetapi, Israel tidak menanggapi secara serius segala persiapan perang yang dilakukan oleh Mesir dan sekutunya. Israel merasa percaya diri karena telah menang dalam dua peperangan melawan negara-negara Arab (Shafir, 2006, hal. 6).

Negara-negara Arab memanfaatkan perayaan Yom Kippur untuk menyerang Israel karena beranggapan bahwa Israel tidak dalam kondisi siaga untuk berperang. Pada bulan Oktober tahun 1973, Pasukan Mesir dan Suriah secara serentak menyerang Israel. Tentara Mesir menyeberangi terusan Suez dan menyerbu pasukan Israel yang berjaga di daerah tersebut. Sedangkan pasukan Suriah menyerbu pertahanan tentara Israel yang ada di dataran tinggi Golan (Shafir, 2006, hal. 4). Kondisi Israel yang tidak siap untuk berperang menyebabkan kubu Israel kerepotan dalam menghadapi serangan dari negara-negara Arab. Meskipun

Israel merasa keberatan menghadapi serangan Mesir, pada akhirnya Israel menang dalam perang tersebut karena masih menguasai sebagian besar wilayah negara Arab.

c. Perjanjian Camp David

Setelah Perang Yom Kippur berakhir dan bangsa Arab gagal untuk mendapatkan kembali wilayahnya, Presiden Mesir melakukan kunjungan ke Jerusalem untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Israel menyetujui upaya normalisasi tersebut dengan adanya beberapa syarat diantaranya adalah dengan mengakui kemerdekaan Israel dan menerima negara Israel dalam kancah regional (Aulas, 1983). Mesir menerima syarat Israel dengan jaminan bahwa Israel juga akan mengembalikan wilayah Mesir yang telah dikuasai Israel pada perang tahun 1967. Normalisasi kedua negara dimulai dengan penarikan pasukan Israel di Semenanjung Sinai (Aulas, 1983). Normalisasi tersebut diresmikan dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Israel dengan Mesir. Perjanjian tersebut disebut dengan Perjanjian Camp David. Perjanjian tersebut menjadi penanda babak baru hubungan antara Israel dan Mesir.

d. Kestabilan Hubungan setelah perjanjian Camp David

Setelah perjanjian Camp David secara resmi ditandatanganinya, Israel mulai menarik mundur sejumlah pasukannya yang sedang berjaga di Semenanjung Sinai. Penarikan pasukan tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat dalam perjanjian Camp David. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Israel harus menyerahkan kembali wilayah Mesir yang telah dikuasainya dan kedua negara bersepakat

untuk membatasi jumlah pasukan kedua negara di perbatasan. Akan tetapi ditengah proses evakuasi Semenanjung Sinai, Presiden Mesir yang melakukan perjanjian damai dengan Israel wafat. Israel berupaya untuk menghentikan proses evakuasi Sinai. Israel khawatir bahwa presiden baru yang menggantikan Anwar Sadat tidak setuju dengan upaya normalisasi dan perjanjian damai antara Israel dengan Mesir (Mazel, 2020). Akan tetapi asumsi Israel terhadap Mubarak salah karena Mubarak mendukung perdamaian antara kedua negara tersebut dan pada akhirnya evakuasi Sinai selesai pada 25 April 1982 (Mazel, 2020).

Setelah adanya perjanjian damai, Mesir menjadi sekutu kedua Amerika di Timur Tengah setelah Israel. Mesir juga tidak lagi ikut campur dalam urusan Israel di Timur Tengah karena Mesir telah mengakui kedaulatan Israel. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, Israel dengan bebas melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya di Timur Tengah. Meskipun Israel beberapa kali bersitegang dengan beberapa negara di Timur Tengah, Mesir membiarkan peristiwa tersebut. Mesir tidak dapat berbuat ketika Israel mengebom reaktor nuklir Irak pada tahun 1981, serangan Israel pada Libanon pada tahun 1984 dan 2006, dan pengeboman yang dilakukan Israel pada markas PLO di Tunis sebagai aksi untuk menekan kegiatan Intifada Palestina (Amin, 2011, hal. 160).

e. Kemunduran Hubungan Israel dengan Mesir

Pemerintahan Mubarak yang pro terhadap Israel mengalami masalah. Ketika gelombang demokrasi Arab mulai merambah ke Mesir, pemerintahan Mubarak terancam. Israel cukup khawatir dengan kondisi politik dalam negeri Mesir. Israel khawatir dengan turunnya pemerintahan Mubarak akan membawa pengaruh buruk bagi negaranya. Hal ini dikarenakan salah satu pihak yang mendukung Mubarak untuk turun dari jabatan adalah kelompok Islam. Apabila pemerintahan Mubarak berhasil ditumbangkan, maka kelompok Islam akan dengan mudah menguasai Mesir. Kelompok Islam merupakan kelompok yang paling kuat dalam menentang berdirinya Israel di wilayah Palestina. Untuk itu, Israel berharap agar Mubarak dapat menyelesaikan masalah dalam negerinya sehingga hubungan antara Israel dengan Mesir tetap stabil (Vidino, 2013).

Pada akhirnya Mubarak gagal dalam mempertahankan pemerintahannya dan Muhammad Mursi terpilih untuk menggantikan Mubarak dari kursi kepemimpinan Mesir. Hal yang dikhawatirkan Israel terjadi, Mursi dengan latar belakang Ikhwanul Muslimin memilih arah kebijakan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya. Nilai-nilai yang dianut organisasi Ikhwanul Muslimin berperan besar dalam pengambilan kebijakan Presiden Mursi. Mesir yang pada awalnya memiliki hubungan yang baik dan menjadi sekutu Amerika di Timur Tengah memilih untuk meminimalisir hubungan dengan Amerika. Hubungan antara Mesir dan Israel yang awalnya sudah dalam tahap stabil kembali tegang akibat dari kedekatan Mursi dengan Hamas. Mesir memiliki hubungan dekat dengan berbagai negara Timur Tengah yang beraliran Islam fundamental seperti Hamas di Palestina, Iran dan Turki, yang mana ketiga negara tersebut merupakan negara yang menolak

keberadaan Israel di negara Palestina (Segell, Mohamed Morsi, Egypt and Israel, 2013).

Mursi juga kerap menyampaikan pernyataan yang dianggap sebagai anti semit bagi bangsa Yahudi. Seperti dalam video yang diunggah oleh MEMRI (Middle East Media Research Institute) Mursi menyatakan bahwa Zionis tidak memiliki hak atas tanah Palestina. Apa yang diambil oleh Israel pada tahun 1947/1948 adalah penjarahan dan apa yang mereka lakukan saat ini adalah kelanjutan dari penjarahan tersebut (Segell, Mohamed Morsi, Egypt and Israel, 2013). Israel merasa bahwa Mursi bersama partai yang mengusungnya memiliki keinginan untuk membatalkan perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Hal ini dikarenakan telah dilakukan jajak pendapat terhadap rencana pembatalan perjanjian perdamaian Mesir dan Israel, hasilnya adalah 54% orang Mesir setuju untuk membatalkan perjanjian tersebut (Fam, 2011).

f. Hubungan Kedua Negara Setelah Kudeta

Pemerintahan Muhammad Mursi hanya bertahan selama satu tahun. Hal ini dikarenakan tepat pada satu tahun masa pemerintahannya, masyarakat Mesir turun ke jalanan kota Kairo untuk berunjuk rasa dan menekan Mursi untuk turun dari jabatannya (Waskito, 2013). Mursi secara resmi turun dari jabatannya setelah dikudeta oleh militer pada tanggal 3 Juli 2013. Setelah masa pemerintahan Mursi berakhir, militer kembali berkuasa dalam pemerintahan Mesir. Jenderal Abdul Fatah Al Sisi menjadi pengganti Mursi dan resmi menjadi presiden Mesir yang keenam. Israel tidak memberikan respon apapun terhadap kudeta yang terjadi pada pemerintahan Mursi. Hal ini dikarenakan Israel sadar dengan sedikit saja reaksi

yang diberikan oleh Israel terhadap kudeta Mursi akan membuat Israel dicurigai sebagai penyebab dari adanya kudeta tersebut (Yegin, Turkey's Reaction to The Coup in Egypt in Comparison with The Us and Israel, 2016).

Pemerintahan pengganti Mursi kembali berkomitmen untuk menjaga perjanjian Camp David dan memperbaiki hubungannya dengan Israel yang menegang ketika masa pemerintahan Mursi. Israel bahkan melakukan berbagai kerjasama dengan pemerintahan presiden Al Sisi. Kerjasama tersebut diantaranya adalah kerjasama ekonomi dan keamanan perbatasan antara Israel dengan Mesir. Israel bekerja sama dengan Mesir untuk menanggulangi permasalahan terorisme yang kerap terjadi di perbatasan antara dua negara (Huda, 2018).

2.2. Biografi Muhammad Mursi

Sebelum membahas mengenai Muhammad Mursi dan kebijakannya yang berpengaruh terhadap Israel, berikut adalah biografi dari Muhamad Mursi. Muhammad Mursi adalah presiden Mesir yang kelima. Muhammad Mursi terlahir dengan nama Muhamad Mursi Issa al Ayyat, lahir pada tanggal 20 Agustus 1952 di sebuah desa kecil bernama Al Adwah, Kairo Mesir (Sobirin, 2016). Mursi mendapatkan gelar Insinyur dan Master Fakultas Teknik Universitas Kairo kemudian mendapatkan gelar Doktor dari University of Southern California pada tahun 1982. Ketika berada di California, Mursi bekerja sebagai asisten profesor di California State University dan (NASA) Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (Sobirin 2016). Mursi kembali ke Mesir pada tahun 1985 dan mulai bekerja sebagai dosen di Universitas Zaqasiq Mesir dan mendapatkan gelar Profesor. Selama bekerja menjadi dosen, Mursi memiliki karir yang cemerlang.

Mursi pernah menjabat sebagai kepala Departemen Teknik di Universitas Zaqasiq Mesir.

Mursi mengawali karir politiknya ketika bergabung dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul muslimin merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Hasan AL Banna pada tahun 1928. Mursi tertarik dengan organisasi ini karena Mursi memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Visi misi dari organisasi tersebut adalah ingin mengembalikan kejayaan islam setelah berakhirnya kekuasaan islam ketika runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Sobirin 2016). Karirnya di organisasi Ikhwanul Muslimin terus meningkat sehingga ketika Ikhwanul Muslimin memutuskan untuk mendirikan sebuah partai, Mursi dipilih untuk memimpin partai tersebut.

Pada bulan Juni 2012, Mursi ditunjuk untuk mewakili partai FJP dalam pemilihan presiden. Pemilihan presiden Mesir setelah revolusi tahun 2011 dilakukan dengan dua putaran. Putaran pertama dimenangkan oleh Mursi dengan mengalahkan 12 calon presiden lainnya. Sedangkan di putaran kedua Muhammad Mursi menang mengalahkan Ahmed Shafiq dengan presentase suara Muhammad Mursi sebesar 51,73% dan Ahmed Shafiq sebesar 48,27% (Hidriyah 2012).

2.3. Kebijakan Presiden Muhammad Mursi

Setelah adanya perjanjian Camp David, Israel dan Mesir menjadi sekutu terbesar Amerika di Timur Tengah. Akan tetapi meskipun demikian, selama menjabat menjadi Presiden, Mursi berupaya untuk menjaga jarak dengan Israel maupun Amerika. Mursi lebih memfokuskan kebijakannya untuk stabilitas regional

Timur Tengah dan memperbaiki hubungan negaranya dengan negara-negara Arab yang lainnya. Mesir dikucilkan dari dunia Arab setelah menanda tangani perjanjian damai dengan Israe. Semenjak saat itu pula Mesir juga tidak dapat dengan jelas membela kemerdekaan Palestina atau membela negara-negara Arab yang sedang berkonflik dengan Israel.

Muhammad Mursi dengan latar belakang Ikhwanul Muslimin memiliki pendapat lain mengenai konflik Palestina. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah kelompok yang paling keras dalam menentang pendirian negara Israel di Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin beranggapan bahwa solusi untuk konflik Palestina dan Israel adalah dengan menggunakan pendekatan agama islam (A. Maftuh Abegebriel 2004). Ikhwanul Muslimin berpendapat bahwa pembebasan Palestina dari penjajahan merupakan agenda wajib bagi umat islam (Porat 2014). Sehingga setiap umat muslim di dunia harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dengan latar belakang tersebut, Mursi menjadikan isu Palestina sebagai isu utama dalam arah kebijakan luar negerinya. Bantuan yang diberikan Mursi terhadap Palestina dimulai dengan membangun hubungan baik dengan salah satu pemimpin otoritas Palestina yaitu Hamas.

Hamas merupakan sebuah organisasi cabang dari Ikhwanul Muslimin yang berdiri di Palestina. Gerakan Hamas tumbuh sehingga menjadi salah satu otoritas yang paling berpengaruh di Palestina. Hamas menjadi gerakan yang paling sulit ditaklukan oleh Israel. Hal ini dikarenakan Hamas merupakan kelompok yang menginginkan kemerdekaan Palestina melalui jalur perlawanan senjata bukan dengan perundingan (Rubin 2010, 94). Meskipun demikian, Hamas tetap mendapatkan banyak simpati baik itu dari dalam maupun luar negeri. Karena

simpati tersebut pada akhirnya Hamas berhasil dalam memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006.

Israel melihat adanya ancaman terhadap negaranya setelah Hamas berkuasa dalam pemerintahan Palestina. Untuk itu Israel berupaya untuk melakukan blokade terhadap jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas (Poort 2011). Ketika menjabat menjadi presiden, Mursi secara aktif berupaya untuk membantu meringankan blokade yang terjadi pada masyarakat Gaza. Bantuan tersebut diantaranya adalah dengan membuka terowongan Rafah yang menghubungkan antara Mesir dengan Gaza. Mursi juga secara aktif menjadi penengah dalam konflik antara Israel dengan Palestina. Berikut uraian kebijakan politik luar negeri Mursi yang terkait dengan Israel:

1. Menambahkan jumlah pasukan yang berjaga di Semenanjung Sinai

Pada tanggal 5 Agustus 2012, sekelompok orang dengan senjata tajam menyerang petugas keamanan yang sedang berjaga di perbatasan wilayah Semenanjung Sinai (Al Jazeera 2012). Penyerangan dilakukan setelah kelompok tersebut berupaya untuk menyeberangi perbatasan untuk memasuki Israel. 16 petugas yang sedang berjaga tewas akibat penyerangan tersebut. Pemerintah mencurigai bahwa kelompok islam militan yang berada di daerah tersebut yang bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan tersebut. Perbatasan antara Mesir dan Israel merupakan wilayah rawan karena sering terjadi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok islam militan yang bermarkas di daerah tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan dengan kelompok militan tersebut dan mengamankan wilayah perbatasan, Mursi mengirimkan sejumlah pasukannya yang

dilengkapi dengan persenjataan berat untuk berjaga di wilayah perbatasan (Hapsari 2012). Israel khawatir dengan kebijakan Mursi yang menambah sejumlah pasukannya untuk berjaga di Sinai. Israel menganggap bahwa kebijakan Mesir untuk menambahkan pasukannya di wilayah Sinai telah melanggar perjanjian damai antara kedua negara. Karena dalam perjanjian Camp David disebutkan bahwa Mesir dilarang untuk mengerahkan tank di wilayah Sinai dan El- Arish tanpa persetujuan dari Israel (Hapsari 2012).

2. Membuka terowongan Rafah untuk membantu blokade Gaza

Mursi membuat kebijakan untuk membuka terowongan Rafah yaitu terowongan yang terletak pada perbatasan antara Mesir dengan Gaza. Terowongan Rafah dibuka mulai hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 (Elyan 2012). Rencananya terowongan tersebut akan dibuka sepanjang hari untuk membantu masyarakat Gaza. Pembukaan terowongan Rafah dilakukan karena Mursi ingin meringankan beban masyarakat Gaza yang kesulitan akibat blokade yang dilakukan oleh pemerintah Israel yang telah terjadi sejak tahun 2006. Terowongan Rafah dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar bagi masyarakat Gaza untuk melihat dunia luar setelah daerah tersebut diblokade oleh Israel (Elyan 2012). Pembukaan terowongan Rafah diharapkan dapat memudahkan masyarakat Gaza yang ingin berobat di wilayah Mesir. Hal tersebut juga memungkinkan untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Gaza dalam bentuk makanan maupun bantuan medis.

Meskipun tampaknya upaya Mursi untuk membuka terowongan Rafah merupakan hal yang positif, akan tetapi pembukaan terowongan Rafah membawa pengaruh buruk bagi negara tersebut. Dibukanya terowongan Rafah menyebabkan

meningkatnya kasus terorisme di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan terowongan tersebut tidak hanya digunakan untuk membawa bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza. Terowongan tersebut digunakan untuk menyelundupkan senjata dan kelompok militan untuk keluar dan masuk ke wilayah Mesir (Shay 2016). Karena bertambahnya serangan terorisme di wilayah Mesir akibat dari pembukaan terowongan Rafah dan aktivitas pasar gelap pada akhirnya Mursi kembali menutup terowongan tersebut untuk alasan keamanan nasional (Meringolo 2015).

3. Penarikan Duta Besar Mesir untuk Israel

Pada bulan November 2012 Israel melakukan operasi pilar pertahanan terhadap masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah jalur Gaza (BBC 2014). Serangan tersebut diawali oleh pihak Hamas yang menyerang jip militer milik Israel. Kemudian Israel membalas serangan tersebut dengan membunuh empat remaja Palestina. Setelah itu kedua belah pihak saling menyerang menggunakan roket yang diterbangkan ke masing-masing wilayah. Israel menargetkan situs wilayah pemerintahan Hamas. Israel menyerang kantor perdana menteri Palestina, Ismail Haniyeh. Serangan Israel terhadap Palestina mengakibatkan sebanyak 175 penduduk Palestina meninggal dan lebih dari 1000 penduduk terluka. Serangan Israel terhadap Palestina mendapatkan banyak protes dari organisasi kesehatan dunia karena rumah sakit di Gaza sudah tidak mampu untuk membantu mengobati korban dari serangan tersebut karena keterbatasan obat-obatan dan alat medis (Hasan 2017).

Mursi menanggapi peristiwa tersebut dengan menarik duta besar Mesir untuk Israel kembali ke negaranya (Huda 2018). Mursi juga berupaya untuk memanggil

duta besar Israel untuk Mesir dan memerintahkannya untuk kembali ke negaranya. Akan tetapi duta besar Israel untuk Mesir telah meninggalkan negara tersebut sesaat setelah tahu bahwa Mursi berupaya untuk mengusirnya dari Mesir. Mursi sebagai pihak yang dekat dengan Hamas mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina. Mesir meminta Israel untuk menghentikan serangan terhadap Palestina karena hal tersebut akan mempengaruhi keadaan di Timur Tengah.

4. Mesir menjadi mediator gencatan senjata antara Israel dan Hamas

Karena arah kebijakan luar negeri Mursi yang menginginkan Mesir untuk ikut andil dalam keamanan regional Timur Tengah membuat Mursi berupaya untuk berpartisipasi dalam menengahi bentrok antara Israel dan Hamas agar regional Timur Tengah menjadi stabil. Setelah terjadi operasi pilar pertahanan yang dilakukan oleh Israel dengan Palestina, kedua belah pihak menolak untuk berkomunikasi secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua negara. Israel mengklaim bahwa pihak Palestina yang memulai serangan tersebut karena menyerang mobil jip patroli Israel di wilayah perbatasan Israel. Selain itu Hamas juga telah meluncurkan lebih dari 100 roket ke Israel selama 24 jam pada saat agresi dilakukan. Sedangkan pihak Hamas menyatakan bahwa Israel telah dengan sengaja menyerang warga sipil mereka dan bertambahnya keluhan mengenai blokade yang dilakukan Israel di wilayah Gaza (Margret Johannsen 2014).

Karena kedua belah pihak menolak untuk berkomunikasi secara langsung, maka dibutuhkan perantara untuk dapat menyelesaikan pertikaian antara Israel

dengan Hamas. Beberapa pihak telah ditunjuk untuk menyelesaikan perseteruan antara Israel dengan Hamas. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Turki, Qatar, Mesir, Amerika dan PBB. Turki, Qatar dan PBB melakukan diskusi dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sedangkan Mursi melakukan pembicaraan dengan pihak Israel dengan Amerika (Margret Johannsen 2014). Kedua belah pihak saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan antara Israel dengan Hamas. Pada akhirnya kesepakatan telah dibuat dan kedua belah pihak setuju untuk melakukan gencatan senjata dan Mesir bertindak sebagai penjamin perdamaian antara kedua negara (Meringolo 2015).



BAB III
ANALISIS IDENTITAS ISRAEL DALAM MEMPENGARUHI
KEBIJAKAN LUAR NEGERINYA TERHADAP KEBIJAKAN
MUHAMMAD MURSI

3.1. Identitas dalam Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme berpendapat bahwa struktur pergaulan manusia adalah sebuah fenomena budaya bukan material. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang mengklaim bahwa setiap negara di dunia bertindak sesuai dengan bagaimana mereka memandang dunia itu sendiri. Cara pandang negara terhadap dunia internasional tergantung pada identitas yang dimiliki oleh negara. Identitas yang dimiliki suatu negara terbentuk dari pengalaman dan norma-norma sosial yang dianut oleh negara tersebut.

Identitas negara sangat penting karena identitas tersebut yang berperan dalam interaksi negara dengan negara lain (Behvaresh 2011). Identitas akan menunjukkan kepentingan aktor dan motivasi dari perilaku aktor. Dengan mengetahui identitas atau posisi negara, setiap negara akan dapat mengidentifikasi kepentingan mereka dalam dunia global dan dapat membuat kebijakan yang dapat melayani kepentingan mereka (Richard W. Mansbach 2008). Identitas tersebut akan tercermin dalam pembuatan kebijakan yang menentukan cara sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam dunia internasional. Atau dapat dikatakan bahwa faktor domestik berperan dalam menentukan bagaimana negara bertindak dalam politik internasional (Rosyidin 2012).

Menurut konstruktivis yang dapat menentukan identitas negara adalah aturan, bahasa, budaya, ideologi dan norma yang dianut oleh negara (Rosyidin, Kebijakan

Cina di Semenanjung Korea: Perspektif Konstruktivis 2012). Konstruktivis beranggapan bahwa negara memiliki sifat sosial sehingga ide-ide, norma yang dianut oleh negara dapat berkembang selama negara tersebut bersosialisasi. Sehingga, identitas dan kepentingan negara dapat berubah mengikuti berkembangnya keyakinan dan norma.

3.2. Identitas negara Israel

Negara Israel merupakan negara yang dikhususkan untuk bangsa Yahudi yang ada di seluruh dunia. Sebelum menjadi negara yang merdeka seperti saat ini, bangsa

Yahudi merupakan bangsa yang tersebar di seluruh dunia dan tidak memiliki wilayah untuk menetap. Oleh karena itu bangsa Yahudi selalu menjadi bangsa nomor dua dimanapun bangsa tersebut berada. Sehingga bangsa Yahudi sering mendapatkan perlakuan buruk dari bangsa lain hingga menjadi korban diskriminasi.

Perlakuan buruk yang selalu didapatkan oleh bangsa Yahudi membuat bangsa tersebut sadar dan merubahnya menjadi semangat nasionalisme. Cita-cita nasionalisme mereka adalah ingin mendirikan sebuah negara yang dapat mempersatukan bangsa Yahudi di seluruh dunia dan menjamin hak-hak mereka. Terjadi perdebatan diantara bangsa Yahudi mengenai dimana mereka seharusnya mendirikan sebuah negara. Satu pihak menginginkan untuk mendirikan negara Israel dimanapun asalkan mereka terbebas dari diskriminasi, Sedangkan pihak dengan suara terbanyak menyebutkan ingin mendirikan negara Israel di tanah Palestina karena sesuai dengan ajaran dalam agama mereka (Waxman 2006). Pada akhirnya cita-cita untuk membangun sebuah negara berhasil dicapai setelah negara Israel merdeka pada tahun 1948.

Setelah resmi merdeka pada tahun 1948, Israel menggunakan ideologi zionisme sebagai dasar negaranya. Pada awalnya zionisme merupakan sebuah gerakan nasionalis bangsa Yahudi yang ingin mendirikan sebuah negara khusus dimana bangsa tersebut dapat terhindar dari tindakan diskriminasi (Kailani 2001). Gerakan nasionalis tersebut berubah menjadi gerakan politik yang melatar belakangi berdirinya negara Yahudi 1948. Ideologi zionisme merupakan gabungan dari rasa nasionalis dan agama yang dianut oleh bangsa Yahudi (Waisberg 2008). Ajaran ideologi zionisme mengajarkan untuk menjaga nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Yahudi yaitu nilai universalisme, individualisme dan menjaga negara Israel sebagai negara Yahudi (Waisberg 2008). Identitas nasional Israel merupakan konstruksi sosial yang terbangun dari sejarah, tradisi, ingatan dan mitos. Sehingga identitas nasional Israel terbentuk dari gerakan nasionalis zionis yang didalamnya juga terdapat nilai religius tradisional berkaitan erat dengan sejarah anti semit terhadap bangsa Yahudi (Waxman 2006).

Ketakutan terhadap gerakan anti semit yang terus membayangi bangsa Yahudi dan ideologi zionisme yang mewajibkan setiap masyarakat untuk selalu menjaga Israel sebagai negara Yahudi menjadi alasan untuk mempertahankan wilayah mereka. Keyakinan bangsa Yahudi untuk mendirikan negara Israel diatas wilayah milik negara Palestina mendapatkan banyak pertentangan dari negara-negara Arab di sekitarnya. Berbagai macam tindakan dilakukan oleh bangsa Arab untuk mengembalikan wilayah Palestina kepada masyarakat Palestina. Peperangan antara Arab dan Israel terjadi tepat ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya.

Peperangan yang terjadi selama 9,5 bulan tersebut berakhir pada awal tahun 1949 dengan kemenangan di pihak Israel. Setelah negara Israel merdeka, Israel

selalu dikucilkan dari dunia Arab. Permusuhan yang terjadi diantara Arab dan Israel membuat kenangan buruk tentang gerakan anti semit terulang kembali. Menteri Luar Negeri Abba Eban menyatakan bahwa permusuhan dengan negara Arab membuat Israel merasa tidak aman dan dalam keadaan berbahaya. Perasaan tidak aman tersebut mengingatkan mereka terhadap tragedi pembantaian bangsa Yahudi di Auschwitz (BICOM Briefing 2017).

Meskipun memiliki hubungan buruk dengan negara-negara di Timur Tengah, pada akhirnya serangan yang diberikan oleh negara-negara tersebut berakhir ketika Israel melakukan perjanjian damai dengan Mesir. Perjanjian tersebut mengurangi kekhawatiran Israel terhadap penolakan negara-negara Arab di wilayah tersebut. Dalam perjanjian tersebut disebutkan mengenai kewajiban Mesir untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Israel. sehingga dengan demikian, Mesir tidak dapat lagi melakukan serangan terhadap Israel dan membantu masyarakat Palestina. Negara-negara Arab yang lain juga tidak dapat kembali menyerang Israel karena kehilangan sosok pemimpin yaitu Mesir karena telah berdamai dengan Israel (Quandt 1986).

3.3. Analisis Pengaruh Identitas Terhadap Kebijakan Luar Negeri Israel

Setelah melewati berbagai hal dan pada akhirnya berhasil mendirikan sebuah negara, membuat bangsa Yahudi berupaya untuk terus mempertahankan wilayah yang dimilikinya. Ideologi zionisme yang dianggap sebagai identitas bagi bangsa Yahudi dicetuskan melalui beberapa perdebatan diantara bangsa Yahudi itu sendiri. Diantara perdebatan tersebut, pada intinya bangsa Yahudi bersepakat untuk terus

mempertahankan apa yang menjadi wilayah negaranya agar negara dapat terus melindungi hak bangsa Yahudi dan terhindar dari diskriminasi.

Dalam teori konstruktivisme disebutkan bahwa identitas yang ada dalam diri negara yang menjadi latar belakang suatu negara untuk mengambil kebijakan tertentu. Identitas negara menurut teori konstruktivisme dibangun dari aturan, bahasa, budaya, ideologi dan norma yang dianut oleh negara. Sedangkan identitas dari negara Israel berasal dari ideologi zionis yang dianut oleh negara tersebut. Ideologi zionis dibentuk dari semangat nasionalis dan nilai religius tradisional yang dianut oleh negara (Waxman, 2006). Dengan menggunakan identitas yang dimiliki Israel, membuat pemerintahan negara tersebut berupaya untuk membuat kebijakan negara yang sesuai dengan identitasnya.

Semangat nasionalis yang ada dalam zionisme berkaitan erat dengan sejarah bangsa Yahudi yang buruk. Dimulai dari menjadi bangsa yang berdiaspora di seluruh dunia sehingga mendapatkan banyak diskriminasi membuat semangat nasionalisme bangsa Yahudi meninggi. Semangat nasionalisme tersebut pada akhirnya berhasil membuat bangsa Yahudi merdeka setelah mendirikan negara Israel. Setelah berhasil mendirikan negara Israel, bangsa Yahudi dihadapkan dengan bangsa Arab yang menolak keberadaan negara tersebut. Negara-negara Arab beberapa kali menyerang negara Israel untuk mengusirnya dari wilayah Palestina. Semangat nasionalisme Israel membuat negara tersebut berusaha untuk terus mempertahankan wilayahnya serangan-serangan negara Arab. Semangat nasionalisme tersebut yang mengakibatkan Israel selalu menang dalam setiap peperangan dengan negara-negara Arab (Marsot, A History Of Egypt From the Arab Conquest to the Present 2007).

Negara-negara Arab berhenti untuk menyerang Israel setelah Mesir melakukan perjanjian damai dengan Israel. Negara-negara Arab kehilangan sosok pemimpin yang dapat memimpin mereka untuk kembali menyerang Israel dan membantu kemerdekaan Palestina. Perjanjian damai membuat hubungan antara Mesir dan Israel menjadi stabil. Kestabilan tersebut terancam ketika gelombang Arab Spring mulai mempengaruhi pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir. Masyarakat yang didominasi kelompok islamis dan revolusioner berunjuk rasa untuk menjatuhkan rezim Mubarak. Israel berupaya untuk mendukung Mubarak agar dapat menyelesaikan permasalahan negaranya agar Mubarak dapat kembali menguasai Mesir dan hubungan antara kedua negara tetap stabil (Vidino 2013). Hal ini dikarenakan apabila rezim Mubarak tumbang, maka kemungkinan besar kelompok islam akan berkuasa di Mesir dan kembali meningkatkan kemungkinan untuk kembali menolak keberadaan Israel di wilayah Palestina (Vidino 2013).

Mubarak gagal dalam mempertahankan kekuasaannya sehingga dengan terpaksa diturunkan dari jabatan dan diganti oleh Muhammad Mursi dengan latar belakang Ikhwanul Muslimin. Organisasi Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu kelompok yang paling menentang berdirinya Israel di wilayah Palestina. Sehingga ketika Mursi menjabat menjadi presiden, isu Palestina merupakan isu utama dalam kebijakan luar negerinya (Jannis Grimm 2012). Mursi mendukung kemerdekaan Palestina dengan beberapa kebijakan luar negerinya. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh besar dalam memberikan semangat bagi Hamas untuk semakin keras dalam menentang pendudukan Israel di wilayah negaranya (Yegin, Turkey's Reaction to the Coup In Egypt, in Comparison with The Us and Israel 2016).

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mursi semakin lama akan membawa pengaruh buruk bagi kedaulatan negara Israel. Dukungan Mursi terhadap Palestina yang ditunjukkan melalui kebijakan luar negerinya akan mempengaruhi kedaulatan Israel. Untuk itu berikut adalah kebijakan luar negeri Israel dalam merespon kebijakan luar negeri Muhammad Mursi:

1. Respon Israel terhadap penambahan jumlah pasukan Mesir di Sinai

Pada saat terjadi penyerangan terhadap para penjaga perbatasan di Mesir oleh kelompok jihadis, Mursi memberikan respon dengan cara menambahkan jumlah penjaga yang difasilitasi alat berat untuk mengamankan wilayah tersebut. Penambahan jumlah pasukan di wilayah Sinai dilakukan Mursi tanpa memberi tahu kepada Israel. Menurut Israel, penambahan jumlah prajurit tersebut mengkhianati isi perjanjian damai yang telah ditanda tangani oleh Mesir dan Israel pada tahun 1979. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian damai tersebut, kedua negara bersepakat untuk membatasi jumlah tentara yang berjaga di perbatasan untuk menjaga perdamaian kedua negara (Issacharoff 2012). Mesir juga dilarang untuk mengirimkan tank di wilayah Al- Arish, akan tetapi Mesir terus berupaya untuk mengirimkan senjata berat tambahan untuk mengamankan wilayah tersebut. Melihat banyaknya pasukan dan persenjataan yang dikirimkan Mursi ke wilayah perbatasan membuat Israel waspada dengan kebijakan Mursi selanjutnya. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu meminta Mesir untuk segera menarik tanknya dari wilayah Sinai. Israel khawatir Mesir mengambil kesempatan dengan menambahkan tank di wilayah Sinai untuk memperkuat kekuasaannya di Sinai (Purwadi 2012). Israel terus memantau kegiatan pasukan Mesir di Sinai. Untuk

mempertahankan negaranya, Israel menempatkan sistem anti rudalnya di wilayah perbatasan Mesir (Hapsari 2012). Sistem anti rudal tersebut nantinya akan digunakan oleh Israel untuk memantau atau melacak apabila Mesir menyerang Israel dengan serangan rudal maupun roket.

2. Respon Israel terkait pembukaan terowongan Rafah oleh Mesir

Israel melakukan blokade terhadap jalur Gaza tepat ketika Hamas menang dalam pemilu legislatif di Palestina pada tahun 2006 (L. Winter 2017). Israel melakukan hal tersebut untuk menekan pemerintahan Hamas sehingga Hamas kehilangan kekuatan untuk menentang Israel. Hamas merupakan otoritas Palestina yang paling sulit untuk ditundukkan oleh Israel. Hal ini dikarenakan Hamas memiliki prinsip untuk menentang Israel dengan kekuatan bukan dengan jalur diplomasi (Rubin 2010). Dengan berkuasanya Hamas di Gaza akan mempermudah otoritas tersebut untuk menentang Israel. Akan tetapi ketika Mursi menjabat sebagai presiden Mesir, ia membuat kebijakan untuk membuka terowongan Rafah yaitu jalur yang menghubungkan antara Mesir dan Gaza yang nantinya dapat digunakan masyarakat Gaza untuk mencari pengobatan atau meminta bantuan.

Pembukaan terowongan Rafah tidak hanya membebaskan masyarakat Gaza dari blokade Israel. Melainkan juga membawa masalah lain bagi Israel maupun Mesir. Pembukaan terowongan Rafah meningkatkan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok teroris yang menguasai wilayah tersebut. Selain itu pembukaan terowongan Rafah membuat Israel khawatir dengan keleluasaan Hamas dalam menyelundupkan senjata baik itu keluar atau masuk ke wilayah Gaza. Israel sudah

lama berupaya untuk menyelesaikan permasalahan di terowongan penyambung antara Mesir dan Gaza.

Kebijakan yang diambil oleh Israel adalah dengan membangun zona penyangga selebar 100 meter yang melintasi kota Rafah, selain itu Israel juga membangun penghalang keamanan di sepanjang jalur Gaza (L. Winter 2017). Penghalang tersebut digunakan untuk memantau situasi di perbatasan. Zona penyangga dan penghalang keamanan telah dibangun oleh Israel dari tahun 2000. Pembangunan zona penyangga dilanjutkan terutama setelah melihat peningkatan aktifitas teroris di wilayah perbatasan. Selain membangun zona penyangga, Israel juga berupaya untuk memasang penghalang bawah tanah, menggali parit berisi air, dan menyegel terowongan-terowongan tersebut (L. Winter 2017)

3. Respon Israel mengenai bantuan Mesir kepada Palestina setelah operasi pilar pertahanan

Setelah terjadi baku tembak antara Israel dengan Hamas pada saat operasi pilar pertahanan, pemerintahan Mursi bereaksi dengan menarik duta besarnya dari Israel. Ketegangan antara Israel dengan Hamas juga dapat diatasi dengan campur tangan Mursi sebagai penengah dan penjamin gencatan senjata antara kedua negara yang sedang bersengketa. Israel memiliki alibi untuk melakukan penyerangan terhadap Hamas. Menurut Israel serangan roket yang ditujukan ke Hamas merupakan upaya Israel untuk membalas dendam karena Hamas telah lebih dahulu menyerang jip militer milik Israel.

Dalam upaya penyelesaian sengketa antara Israel dengan Hamas, kedua belah pihak menolak untuk berbicara secara langsung. Sehingga kedua negara

membutuhkan mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mesir bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Hamas. Pada awalnya Israel tidak setuju karena Israel menganggap prinsip gencatan senjata yang diajukan oleh Mesir lebih menuntungkan pihak Hamas (Ravid 2012). Israel menginginkan untuk terus menyerang Gaza dan menggulingkan Hamas. Akan tetapi setelah mendapat banyak tekanan dari Amerika, Israel menyetujui gencatan senjata yang diajukan oleh Mesir. Amerika menjanjikan Israel untuk menekan Mesir terkait penyelundupan senjata dari Mesir ke Gaza dan berjanji untuk memberikan bantuan dana untuk sistem pertahanan rudal Israel (Ravid 2012).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Usaha yang dilakukan bangsa Yahudi untuk mempertahankan sebuah negara mengalami hambatan ketika Muhammad Mursi menguasai pemerintahan Mesir pada tahun 2012. Ketidak stabilan hubungan antara Israel dengan Mesir pada umumnya diakibatkan oleh perbedaan kepentingan antara kedua negara mengenai konflik Palestina. Israel merupakan negara yang berdiri diatas wilayah Palestina berkepentingan untuk menganeksasi wilayah tersebut dan menguasainya secara keseluruhan. Identitas bangsa Israel yaitu ideologi zionis yang terdiri dari rasa nasionalis terbentuk dari sejarah panjang mengenai usaha mereka untuk mendirikan sebuah negara, menjadi alasan bagi Israel untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasainya.

Ketika Muhammad Mursi menguasai Mesir, Mursi menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya. Dalam kurun waktu yang panjang, kebijakan luar negeri tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap kedaulatan Israel. Untuk itu perlu bagi Israel untuk memberikan tanggapan atau merespon kebijakan luar negeri Mursi dengan kebijakan luar negerinya.

Ketika Mursi berupaya untuk menambahkan jumlah pasukan di perbatasan, Israel merespon dengan memasang alat pendeteksi rudal di perbatasan untuk menghindari kemungkinan datangnya serangan dari Mesir. Ketika Mursi berupaya untuk membuka terowongan Rafah untuk membantu blokade Gaza, Israel membangun zona penyangga dan membanjiri terowongan-terowongan yang

lainnya dengan air. terakhir ketika Mursi menjadi mediator dalam gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, Israel melakukan lobi dengan Amerika untuk menekan Mesir agar tidak menyelundupkan senjata kepada Hamas. Kebijakan luar negeri yang telah disebutkan diatas dilatar belakangi oleh ideologi zionis yang mana menuntut untuk menjaga dan mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi agar tidak diganggu kedaulatannya oleh negara lain.

4.2. SARAN

Berkaitan dengan saran penelitian bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, penulis memberikan beberapa opsi diantaranya:

- a. Kelanjutan hubungan bilateral antara Mesir dengan Israel setelah kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursi
- b. Pengkajian mengenai keterlibatan Israel dalam kudeta Muhammad Mursi.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Maftuh Abegebriel, A. Y. (2004). *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*. Yogyakarta: SR- INS Publishing.
- Abul-Megd, Z. (2013). The Egyptian Military in Politics and The Economy: Recent History and Current Transition Status. *CMI Insight*, 2.
- Al Jazeera. (2012). *Egypt border guards killed in Sinai attack* . Al Jazeera.
- Amstrong, K. (2006). *Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang Teluk*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- BBC. (2014). *Gaza Crisis: Toll of Operation in Gaza*. bbc.com.
- Beck, M. (2014). Hamas, israel and the July Gaza War 2014: War of the Result of a Policy of Consecutive Provocations. *Centre for contemporary Middle East Studies*, 3.
- Behvaresh, M. (2011). The Thrust of Wendtian Constructivism. *E-International Relations*, 1.
- BICOM Briefing. (2017). Causes and Consequences of The Six Day War. *Britain Israel Communication and Research Centre*, 1.
- Chandra, R. (2018). Pengaruh Identitas Persahabatan Amerika Serikat dan Israel Terhadap Penolakan Keanggotaan Palestina di PBB. *Researchgate.net*, 12.

- Corbetta, P. (2003). *Social Research: Theory, Methods and Technique*.
uk.sagepub, 48.
- (2019). *Egypt's Mohammed Mursi: A Turbulent Presidency Cut Short* . London:
BBC.com.
- Eka Risya Fitri, F. F. (2019). Analisis Lobi Israel Terhadap Kebijakan Luar
Negeri Amerika Serikat pada Konflik Palestina dan Israel. *Jurnal Ilmiah
Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 6.
- Elgindy, K. (2012, August 25). *Egypt, Israel, Palestine*. Dipetik June 15, 2020,
dari www.brookings.edu
- Elyan, T. (2012). *Egypt Reopens Rafah Crossing with Gaza: Sources* . Ismailia:
Reuters.
- Felsberger, S. (2014). Palestine in Egypt: From Solidarity to Fear to Common
Struggle. *Austria Institut Fur Europa Und Sicherheitspoliti*, 2.
- Garaudy, R. (1988). *Israel dan Praktek Praktek Zionisme*. Bandung: Pustaka.
- Gregory Harms, T. M. (2017). *The Palestine-Israel Conflict A Basic Introduction*.
London: Pluto Press.
- Hapsari, E. (2012). *Ini dia Mesir era baru yang dicemaskan Israel*. Republika.
- Hasan, H. (2017). *Remembering Israel's Operation Pillar of Defense* .
middleeastmonitor.com.
- Hidriyah, S. (2012). Terpilihnya Muhammad Mursi dan Babak Baru Demokrasi di
Mesir. brkas.dpr.go.id, 6.
- Hoffman, R. (2017). Israel's Foreign Policy under Benjamin Netanyahu. *Foreign
Policy Research Institute*, 7.
- Irenewaty, L. N. (2015). Kebijakan Politik Muhammad Mursi Sebagai Presiden
Mesir tahun 2012-2013. *Soci Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 97.
- Iskandar. (2014). Dukungan Militer Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina
2011-2013. jom.unri.ac.id, 4.
- Issacharoff, A. (2012). *Egypt Deployed Troops in Sinai Without Israel's Prior
Removal*. hasretz.com.
- Jannis Grimm, S. R. (2012). Egyptian Foreign Policy Under Mohamed Morsi.
Stiftung Wissenschaft Und Politik, 1.

- Kailani, H. A. (2001). *Siapa Teroris Dunia?* Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Laura Zittrain Eisenberg, N. C. (2010). *Negotiating Arab-Israeli Peace Patterns, Problems, Possibilities*. Indiana: Indiana University Press.
- Magen, A. (2014). Comparative Assessment of Israel's Foreign Policy Response to The Arab Spring. *Journal of European Integration*, 118.
- Margret Johannsen, C. W. (2014). Conflict Mediation in the Middle East Lesson from Egypt as a mediator and object of mediation. *Policy Brief for the Middle East Conference*, 6.
- Marsot, A. L.-s. (2007). *A History Of Egypt From the Arab Conquest to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meringolo, A. (2015). From Morsi to Al-Sisi: Foreign Policy at the Service of Domestic Policy. *Insight Egypt*, 3.
- Poort, D. (2011, November 2). *Al Jazeera*. Dipetik September 1, 2020, dari www.aljazeera.com
- Porat, L. (2014). The Muslim Brotherhood and Egypt-Israel Peace. *Mideast Security and Policy Studies*, 14.
- Pradana, H. A. (2012). Fluktuasi Agresifitas Politik Luar Negeri Israel terhadap Palestina. *ejournal.umm.ac.id*, 70-71.
- Purwadi, D. (2012). *Netanyahu desak Mesir tarik tanknya dari Sinai*. Republika.
- Quandt, W. B. (1986). Camp David and Peace Making in The Middle East. *Political Science Quarterly*, 358.
- Ramadhan, I. (2017). Lobi Israel Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. *Journal of International Studies*, 145.
- Ravid, B. (2012). *Decision to Accept Gaza Truce*. Haaretz.
- Richard W. Mansbach, K. L. (2008). *Introduction to Global Politics*. London : Routledge.
- Rosyidin, M. (2012). Kebijakan Cina di Semenanjung Korea: Perspektif Konstruktivis. *Global and Strategies*, 4.
- Rosyidin, M. (2012). Mengapa Tidak Berperang? Norma Politik Luar Negeri Cina dan Konflik Laut Cina Selatan. *Andalas Journal of International Studies* , 3.

- Rubin, B. (2010). *Muslim Brotherhood The Organization and Policies of a Global Islamist Movement*. Palgrave Macmillan: New York.
- Salameh, M. A. (2012). The Camp David Accords: Lesson and Facts. *The Society of Arab Faculties of Arts*, 6.
- Segell, G. (2013). Mohamed Morsi, Egypt and Israel. *E-Internatinal Relation*, 1.
- Shay, S. (2016). Egypts war against the tunnels between Sinai and Gaza strip. *Institute for Policy and Strategy IDC Herzeliya*, 1.
- Sobirin, A. (2016). *Muhammad Mursi Pemimpin Negara dan Penghafal AL Quran*. Yogyakarta: Penerbit Kyta.
- Stein, K. W. (2009). Historical Context for the Egypt-Israeli Treaty . *The Middle East Institute Viewpoints*, 13.
- Vidino, L. (2013). The West and The Moslem Brotherhood after The Arab Spring. *Al Mezbar Studies and Research Center*, 130.
- Waisberg, T. (2008). The Split of Zionist Ideology and the morality of Jewish self determination in the Global Age:. *The Justice of Zionism Tel Aviv University* (hal. 14). Tel Aviv: Researchgate.net.
- Waskito, A. (2013). *Air Mata Presiden Muhammad Mursi*. Jakarta: Al Kautsar.
- Waxman, D. (2006). *The Pursuit of Peace and the Crisis of Israel identity*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Winter, L. (2017). Egypt and Israel: Tunnel Neutralization Efforts in Gaza. *The Foreign Military Studies Office*, 32.